BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut informasi yang diperoleh dari laman resmi *biropemerintahan.bantenprov.go.id*, Terbentuknya Kota Tangerang Selatan diawali pada akhir tahun 2006 dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menyetujui terbentuknya Kota Tangerang Selatan. Proses terbentuknya diakhiri pada Oktober 2008 yang diresmikan oleh Mardiyanto yang pada saat itu sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia. Kota Tangerang Selatan itu sendiri adalah daerah yang terletak di Provinsi Banten yang merupakan pecahan dari kota Tangerang. Kota ini terbentuk atas daerah otonom pada tahun 2008 berdasar pada Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 mengenai Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Tujuan terbentuknya Kota ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan serta memberikan pemanfaatan potensi daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik agar masyarakat Tangerang Selatan sejahtera.

Tabel 1.1

Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Daerah Provinsi Banten

Bulan/tahun	Kota/kabupaten	Penduduk usia kerja (Ribu)	Angkatan kerja (Ribu)	Bekerja (Ribu)	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	Tingkat pengangguran terbuka (%)
Februari 2018	Kab. Lebak	388,5	53,19	51,84	13,69	2,541
	Kab. Pandeglang	647,5	110,79	107,98	17,11	2,541

<i>(sambungan)</i>	Kab. Serang	647,5	132,93	130,68	20,53	1,694
	Kab. Tangerang	906,5	217,11	213,43	23,95	1,694
	Kota Cilegon	1.620	269,41	264,38	16,63	1,868
	Kota Tangerang	2.592	517,10	509,38	19,95	1,494
	Kota Serang	1.425	236,98	232,55	16,63	1,868
	Kota Tangerang Selatan	842,4	112,04	109,53	13,30	2,241

Sumber: data yang telah diolah dari BPS, sakernas.

Berdasarkan Tabel 1.1 kota Tangerang Selatan memiliki tingkat persentase pengangguran tertinggi ketiga setelah kabupaten Lebak dan kabupaten Pandeglang. Namun kota Tangerang Selatan memiliki penduduk usia kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan kedua kabupaten tersebut yang bisa disimpulkan bahwa banyak sumber daya manusia di kota Tangerang Selatan yang tidak atau belum bekerja dan sangat menumpuk. Sebagai kota yang bisa di bilang sangat dekat dengan ibu kota Jakarta yang juga merupakan tempat perputaran ekonomi tercepat dan menjadi sumber nafkah dari warga kota Tangerang Selatan maka kota Tangerang Selatan pun harus menyesuaikan infrastrukturnya agar membuat mobilitas yang dimiliki masyarakat kota Tangerang Selatan menjadi lebih cepat dan berkembang secara ekonomi dan lingkungan.

Pada tahun 2018 Kota Tangerang Selatan berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Banten untuk menilai kualitas laporan keuangan daerah. Ini bukan pertama kalinya Kota Tangerang Selatan mendapatkan predikat tersebut melainkan 5 tahun berturut-turut berhasil meraih predikat WTP pada laporan keuangan daerah. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengatakan bahwa prestasi WTP menunjukkan bahwa sinergitas legislatif dan eksekutif saling menguatkan demi

terciptanya transparansi anggaran untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan. Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga mengapresiasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah melaksanakan tugas dengan baik sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Kota Tangerang Selatan (poskotanews.com: Anton)

Dalam menyambut era modern ini atau bisa disebut sebagai era milenial Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang di bawah kepemimpinan Drs. H. Akhmad Lutfi memiliki sasaran strategis mewujudkan sumber daya yang profesional. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan BKPSDM harus menyiapkan sarana dan pra-sarana seperti ruangan yang berkonsep *art deco*, represionis pelayanan, administrasi kepegawaian, ruang laboratorium komputer, dan memiliki sistem informasi kepegawaian daerah (SIMPEG). Secara gratis tanpa dipungut biaya seperpun SIMPEG dapat diakses untuk menunjang data seputar *update* data kepegawian atau kenaikan pangkat karena informasi seperti itu sudah berada dalam SIMPEG (respublika.id: Akhmad Lutfi). Dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu pemerintah dalam pengurusan kepegawaian mulai dari pengisian, pengelolaan dan pemusatan data secara terkomputerisasi sehingga dapat menangani berbagai laporan yang berhubungan dengan kepegawaian. Dalam mengetahui kompetensi sumber daya manusia pada setiap daerah pemerintah dapat melihat melalui sistem informasi tersebut dengan cara melakukan pengawasan dan penilaian pada masing-masing daerah.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai kualitas laporan keuangan daerah adalah sebuah kesesuaian dengan standar yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Laporan keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) adalah output dari suatu sistem akuntansi yang tidak terlepas dari siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran (penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD), pelaksanaan APBD, pengawasan sampai kepada pertanggungjawaban APBD, sehingga untuk menguraikan secara komprehensif penyebab dari dihasilkannya suatu opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD. dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas harus memenuhi karakteristik-karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2010, karakteristik ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar LKPD dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, karakteristik-karakteristik tersebut ialah, relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami (Yadiati & Mubarak, 2017:24).

Menurut Yadiati dan Mubarak (2017:56) Pengukuran Kualitas Laporan Keuangan Daerah dilihat dari opini yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan masing-masing Daerah terbagi menjadi 4, diantaranya: Pertama, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini yang dikeluarkan karena hasil pemeriksaan telah terbebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material. Kedua, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini yang dikeluarkan karena hasil pemeriksaan ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam bukti-bukti pemeriksaan, namun tidak mempengaruhi kewajaran dalam Laporan Keuangan karena penyajian dilakukan sesuai dengan SAP hanya saja tidak material pemeriksa tidak memperoleh keyakinan yang material. Ketiga, Tidak Wajar adalah opini yang dikeluarkan karena pemeriksa meyakini bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan mengandung banyak kesalahan dan kekeliruan material. Keempat, Tidak Memberikan Pendapat adalah opini yang dikeluarkan karena pemeriksa tidak bisa meyakini bahwa laporan keuangan tersebut benar atau salah yang disebabkan oleh kurangnya bukti-bukti yang diterima pemeriksa seperti laporan keuangan tidak sesuai dengan SAP.

Kota Tangerang Selatan merupakan Kota kecil dipinggir Kota DKI Jakarta yang populasi lebih dari 1,5 juta penduduk. Pada kurun waktu 5 tahun terakhir Kota ini berhasil mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Hal ini tentu saja dipertanyakan oleh masyarakat karena kantor Pemerintahan Kota

Tangerang Selatan pada tahun 2018 dinilai belum layak ditempati sedangkan waktu pengerjaan yang cukup lama melebihi waktu yang dijanjikan. Bahkan bukan hanya masyarakat saja yang menyadarinya tetapi LSM Tangerang *Public Transparency Watch* (TRUTH) mengumumkan terdapat kejangalan akan hasil opini dari BPK RI. Hal ini dibuktikan karena LKPD tahun 2017 dengan predikat WTP tanpa adanya dokumen yang disediakan oleh pemerintah untuk dilihat maupun di akses oleh masyarakat. Padahal pada tahun 2017 terdapat sejumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan daerah yang berpotensi kecurangan (jakarta.tribunnews.com).

Menurut Saleh *et al* (2013:412) Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan kompetensi tinggi untuk sumber daya manusia karena dapat membantu prestasi instansi ataupun karyawan itu sendiri. Konsep dasar dari standar diartikan sebagai ukuran atau patokan yang disepakati, sedangkan kompetensi diartikan sebagai keahlian untuk melaksanakan tugas-tugas ditempat kerja yang mencakup menerapkan keterampilan (*skills*) yang didukung dengan pengetahuan (*cognitive*) dan kemampuan (*ability*) sesuai dengan kondisi yang dihadapi saat berlangsungnya sebuah tugas atau pekerjaan (Ardiana *et al*, 2010). Penelitian ini akan membahas mengenai kualitas sumber daya manusia yang meliputi kompetensi sumber daya manusia dan tingkat tanggung jawab sumber daya manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan informasi pada laman jakarta.tribunnews.com, Ketua Komisi II DPRD Tangerang Selatan, Ahmad Syawqi, pengembang sumber manusia di kota Tangerang Selatan akan terus dilakukan mengingat kurang kompetennya sumber daya manusia yang dimiliki oleh kota Tangerang Selatan dalam menggunakan teknologi atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

Pada tahun 2018 didapati Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tangerang Selatan terkait kasus korupsi dan sejumlah karyawan yang tidak masuk kerja berbulan-bulan. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan yang menyampaikan sebanyak tujuh orang yang terlibat tindak pidana korupsi dan 10 orang yang tidak masuk sampai berbulan-bulan. Akibatnya tujuh orang tersebut dilakukan pemecatan secara tidak

hormat karena sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang sepakat menindak lanjuti SKPD tersebut diberhentikan dan 10 orang lagi telah dihentikan gajinya serta dilakukan pemanggilan ke kantor tempat SKPD tersebut bekerja (wartakota.tribunnews.com). Penyebab dari kasus tersebut karena tidak adanya tingkat tanggung jawab sumber daya manusia di Kota Tangerang Selatan.

Menurut penelitian Nuryanto *et al* (2013) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kemudian pada penelitian Sagara (2015) kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pada penelitian selanjutnya yaitu Anwar *et al* (2016) kompetensi sumber daya manusia dan juga sistem penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Menurut penelitian Sihite *et al* (2017) kompetensi staf akuntansi secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tidak adanya konsistensi pada penelitian terdahulu yang membuat variabel ini masih harus diuji kembali.

Menurut Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 39 Tahun 2016 mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah mengungkapkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan prosedur yang terkomputerisasi dengan proses awal pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran hingga pelaporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Mahsun (2014) penerapan sistem keuangan daerah adalah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemda yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah untuk menentukan kualitas laporan keuangan. Penerapan SAPD mempengaruhi penyusunan LKPD yang digunakan untuk memberikan informasi kepada pihak berkepentingan untuk mengambil sebuah keputusan dan memberikan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam hal ini, penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) digunakan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui kualitas LKPD yang disajikan untuk mengambil sebuah opini dari aktivitas keuangan pemerintah daerah tersebut dan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Tabel 1.2

Daftar Opini Laporan Keuangan Daerah Provinsi Banten tahun 2014-2018

No	Entitas	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Provinsi Banten	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
2.	Kabupaten Lebak	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
3.	Kabupaten Pandeglang	WDP	TMP	WDP	WTP	WTP
4.	Kabupaten Serang	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP
5.	Kabupaten Tangerang	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP
6.	Kota Cilegon	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP
7.	Kota Serang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
8.	Kota Tangerang	WTP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP
9.	Kota Tangerang Selatan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : <http://banten.bpk.go.id> (2019)

Pada Tabel 1.2 dijelaskan bahwa dalam 5 tahun terakhir kota Tangerang selatan telah mendapatkan opini yang menyatakan laporan keuangan kota tersebut sangat berkualitas dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). LKPD tersebut diperiksa atau dinilai oleh BPK, penilaian atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan

melaksanakan audit setiap tahunnya. Terdapat 4 hasil penilaian BPK dinyatakan dalam bentuk opini yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Sudiarianti, *et al* 2015).

Tetapi, menurut informasi yang ditemui pada laman *tribunjakarta.com* terdapat penyimpangan anggaran pada LKPD tahun 2017. Penyimpangan tersebut dikemukakan oleh Koordinator Tangerang *Public Transparency Watch* (TRUTH) Aco Ardiansyah yang mengatakan bahwa beliau melihat indikasi kecurangan karena adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 455 juta atas pekerjaan peningkatan jalan, temuan kedua pada anggaran Dinas Bangunan dan Penataan Ruang (DBPR) yang mana terdapat kurangnya pemenuhan spesifikasi dan lambannya pembangunan gedung DPRD, Gedung III Pemkot tahap dua dan gedung SDN 1 Jurang Mangu Barat potensi kerugian atas temuan tersebut sebesar Rp 1 Miliar. Temuan ketiga pada penyimpangan anggaran dari belanja jasa service fiktif sebesar Rp 24 juta dan temuan yang terakhir pada penyimpangan anggaran belanja bahan Dinas Perpustakaan dan arsip daerah dengan nilai kerugian sebesar Rp 199 juta. Diduga penyimpangan tersebut dipengaruhi oleh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang tidak sesuai dengan kapasitas dari daerah tersebut yang berujung menjadi masalah untuk Kota Tangerang Selatan.

Menurut Ihsanti (2014) menjelaskan sistem penerapan akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu serangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Akuntansi pemerintahan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun menggunakan perangkat seperti komputer yang dimulai dari pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan posisi keuangan serta pengoperasian keuangan pemerintah, dengan berfungsinya sistem akuntansi pemerintahan dapat dilakukannya penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan mudah, andal, tepat waktu, dan akuratnya suatu laporan keuangan

(Mulalinda *et al*, 2014). Menurut Segara (2015) Sistem penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kemudian pada penelitian Anwar *et al* (2016) sistem penerapan akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif. Terakhir, pada penelitian Sihite *et al* (2017) mengatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kota Tangerang Selatan dapat dikatakan dalam pengelolaan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang kurang sehingga timbulah masalah seperti penyimpangan pada kualitas laporan keuangan daerah dengan adanya penyimpangan dana yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan dilakukannya pembagian kuesioner kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah bagian akuntansi atau keuangan masing-masing divisi.

Berdasarkan fenomena dan beberapa kesimpulan dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”**.

1.3 Perumusan Masalah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan tersebut bisa disebut juga laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik, karena dana yang digunakan untuk kebutuhan suatu daerah berisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan keuangan daerah yang telah disajikan harus disesuaikan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) agar dapat dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa dan diberikan opini audit yang menjadi dasar dari penilaian kualitas laporan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan daerah pada penelitian ini dihubungkan dengan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi pemerintah

daerah. Hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan laporan keuangan daerah dimana bertujuan untuk melakukan penyusunan LKPD yang berasal dari keterampilan, pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia. Sedangkan, hubungan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan proses penyusunan LKPD dari pengumpulan data hingga pelaporan data keuangan.

Kota Tangerang Selatan dapat dikatakan dalam pengelolaan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang kurang sehingga timbulah masalah seperti penyimpangan pada kualitas laporan keuangan daerah dengan adanya penyimpangan dana yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan dilakukannya pembagian kuesioner kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bagian akuntansi atau keuangan masing-masing divisi.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Pertanyaan penelitian tersebut, sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKPD) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial kompetensi sumber daya manusia dan penerapan SAKD terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019:
 - a. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia secara parsial terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada

Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019?

- b. Bagaimana pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) secara parsial terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan pertanyaan penelitian diatas maka dapat didefinisikan bahwa tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKPD) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kompetensi sumber daya manusia dan penerapan SAKD terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019:
 - a. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia secara parsial terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) secara parsial terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca maupun peneliti selanjutnya, baik secara aspek teoritis maupun praktis, seperti berikut ini:

1.6.1 Aspek Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai hubungan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Tangerang Selatan.
2. Menambah wawasan serta referensi bagi para pembaca, dan peneliti selanjutnya tentang akuntansi pemerintahan dan LKPD.

1.6.2 Aspek Praktis

Bagi Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah untuk tercapainya kualitas laporan keuangan daerah.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang akan diteliti dan menjadi variabel independen atau variabel X adalah kompetensi sumber daya manusia (X1), penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) (X2). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini atau variable Y adalah kualitas laporan keuangan daerah.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian seluruhnya terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan mencakup Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penulisan penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab tinjauan pustaka dan lingkup penelitian berisi landasan teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab metodologi penelitian berisikan karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, teknik analisis dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan berisi deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kesimpulan dan saran berisi tentang kesimpulan dan keterbatasan penelitian. Serta saran yang diberikan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan